

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA KOTA CILEGON-KOTA SERANG DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN

Fikri Sastra Aulia¹, Deni Putra Prianggara Yuda², Rizki Ramadhan³

[¹sastraauliafikri@gmail.com](mailto:sastraauliafikri@gmail.com), [²deniputraprianggarayuda@gmail.com](mailto:deniputraprianggarayuda@gmail.com),
[³rizki.ramaaadhaan@gmail.com](mailto:rizki.ramaaadhaan@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan kontribusi ekonomi yang tinggi, namun masih menghadapi tingkat pengangguran yang signifikan akibat ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Kota Serang, sebagai pusat pemerintahan dan penyedia tenaga kerja utama, memiliki keterkaitan fungsional dengan Cilegon dalam aspek ketenagakerjaan dan mobilitas ekonomi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam kolaborasi kedua kota mencakup lemahnya koordinasi kebijakan, struktur industri yang padat modal, serta rendahnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antarwilayah yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk menyinergikan kebijakan pendidikan, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, dan integrasi data ketenagakerjaan. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memperkuat pasar kerja regional dan mengurangi tingkat pengangguran secara efektif di Provinsi Banten.

Kata Kunci: Kerja Sama Antar Daerah, Pengangguran, Ketenagakerjaan, Kota Cilegon, Kota Serang, Pembangunan Ekonomi Regional.

PENDAHULUAN

Kota Cilegon dan Kota Serang merupakan dua wilayah strategis di Provinsi Banten yang memiliki keterkaitan erat dalam aspek ekonomi, sosial, dan tenaga kerja. Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Banten melalui sektor manufaktur dan pengolahan baja, sedangkan Serang berperan sebagai pusat pemerintahan dan jasa publik provinsi. Meskipun potensi ekonomi Cilegon sangat besar, tingkat pengangguran di wilayah ini masih relatif tinggi karena sebagian besar tenaga kerja lokal belum mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah yang lebih terampil (Cahyani & Karniawati, 2024).

Hubungan fungsional antara kedua kota ini menjadi penting karena banyak tenaga kerja dari Serang yang bekerja di kawasan industri Cilegon. Namun, ketimpangan akses terhadap lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam upaya mengurangi pengangguran di kedua wilayah tersebut. Dalam hal pembangunan wilayah, kerja sama antar kota seperti Cilegon-Serang menjadi bentuk nyata implementasi konsep inter-city cooperation yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan integrasi pasar tenaga kerja regional (Naafs, 2018).

Kebijakan kolaboratif antara Cilegon dan Serang dapat berperan dalam memperkuat sinergi pembangunan industri dan ketenagakerjaan, sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan kemampuan masyarakat lokal. Di sisi lain, kebijakan investasi daerah yang tepat dapat menjadi katalis dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat di wilayah penyangga seperti Serang (Setyadi & Oktaviana, 2021). Studi ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana bentuk dan

efektivitas hubungan kerja sama antar kota dalam menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kolaborasi lintas wilayah dalam konteks pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta merumuskan strategi sinergi antar kota untuk mengurangi pengangguran regional secara berkelanjutan

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran penting mengenai relevansi kerja sama lintas wilayah dalam konteks pengangguran dan pembangunan ekonomi daerah.

Studi oleh Cahyani & Karniawati (2024) menunjukkan bahwa meskipun Cilegon memiliki industri besar seperti Krakatau Steel dan perusahaan kimia lainnya, pengangguran masih tinggi akibat rendahnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Setyadi & Oktaviana (2021) menemukan bahwa peningkatan investasi daerah tidak otomatis menurunkan pengangguran, karena sebagian besar investasi masih berorientasi pada sektor padat modal, bukan padat karya. Penelitian Naafs (2018) mengenai tenaga kerja muda di wilayah Banten mengungkap adanya kompetisi sosial antara pekerja lokal dan migran industri yang memperburuk tingkat pengangguran di daerah sekitar Cilegon dan Serang.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar kota seperti Cilegon–Serang diperlukan untuk membangun integrasi kebijakan ekonomi, investasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan agar penurunan angka pengangguran dapat dicapai secara sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis hubungan kerja sama antara Kota Cilegon dan Kota Serang dalam mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kerja sama antardaerah, pembangunan ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan (Ferdiansyah et al., 2024).

Metode penelitian ini menekankan bahwa pendekatan studi literatur mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kebijakan kerja sama antar kota, terutama dalam permasalahan Cilegon–Serang. Melalui analisis sintesis berbagai sumber akademik dan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan tata kelola di Provinsi Banten tetap didominasi oleh rendahnya kualitas pelayanan publik dan ketidakefektifan birokrasi (Nurfaisal, 2024). Laporan yang dikaji mengungkap bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sekitar 68%, yang menegaskan perlunya perbaikan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem digital pemerintahan untuk meminimalkan penyimpangan dan mempercepat layanan (Nurfaisal, 2024). Tantangan birokrasi ini diperparah oleh budaya organisasi yang masih diwarnai praktik nepotisme serta lemahnya pengawasan internal, yang menghambat implementasi kebijakan strategis secara efektif (Nurfaisal, 2024). Sejalan dengan itu, faktor kompetensi dan meritokrasi masih kurang dominan dalam pengisian jabatan strategis, sehingga upaya reformasi birokrasi belum mencapai efektivitas yang diharapkan (Nurfaisal, 2024).

Meskipun Kota Cilegon dikenal sebagai pusat industri, temuan penelitian

memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi isu prioritas yang belum tertangani secara optimal oleh pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Cilegon konsisten meningkat, dari 9,33% pada tahun 2018 menjadi 12,69% pada tahun 2020 (Purnama et al., 2024). Tingginya pengangguran ini terutama disebabkan oleh industri yang beroperasi mayoritas merupakan industri padat modal dan bukan padat karya, sehingga minim dalam penyerapan tenaga kerja lokal (Purnama et al., 2024). Selain itu, terdapat masalah sistemik berupa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri, sebuah faktor yang diperburuk oleh kurangnya koordinasi antara perusahaan dan dinas terkait (Cahyani & Karniawati, 2024; Purnama et al., 2024). Kelompok rentan, seperti pekerja informal, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat berpendidikan rendah, menghadapi risiko tertinggi terhadap peningkatan kemiskinan (Aisah et al., 2020; Cahyani & Karniawati, 2024).

Di tingkat provinsi, salah satu faktor struktural yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi adalah arus investasi yang tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja (Setyadi & Oktaviana, 2021). Studi menunjukkan bahwa realisasi investasi yang tinggi di Banten sebagian besar terserap pada sektor padat modal, seperti listrik, gas, telekomunikasi, dan kawasan industri, yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah (Setyadi & Oktaviana, 2021). Temuan kritis lainnya adalah ketimpangan distribusi investasi yang ekstrem, di mana 99% investasi terkonsentrasi di wilayah Banten Utara dan Tengah, sementara Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) hanya menerima porsi yang sangat kecil (Setyadi & Oktaviana, 2021). Hambatan tambahan di wilayah selatan meliputi keterbatasan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya belanja modal, dan minimnya infrastruktur, yang secara kolektif membatasi potensi pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di area tersebut (Setyadi & Oktaviana, 2021).

Hasil kajian terkait dinamika ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa urbanisasi memberikan tekanan besar pada daerah perkotaan, meningkatkan persaingan kerja dan memperburuk ketidakseimbangan pasar kerja, sebuah dinamika yang sangat relevan dengan koridor Cilegon-Serang. Pertumbuhan populasi akibat urbanisasi di kawasan metropolitan menciptakan mismatch keterampilan dan memperluas sektor informal, serta menekan infrastruktur dan layanan publik yang sulit mengimbangi laju pertumbuhan penduduk (Ferdiansyah et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan struktural yang kompleks ini, strategi yang diidentifikasi melibatkan penggunaan skema pembiayaan kreatif, khususnya dengan mengoptimalkan sinergi pendanaan melalui mekanisme seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Irfan, 2024). Sinergi pendanaan ini dinilai vital untuk menutup fiscal gap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memaksimalkan hasil dari program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara terintegrasi (Irfan, 2024).

Kondisi Hubungan Tenaga Kerja antara Cilegon dan Kota Serang

Hubungan ketenagakerjaan antara Cilegon dan Kota Serang terbentuk karena perbedaan karakter ekonomi kedua wilayah. Cilegon memiliki struktur industri yang berfokus pada sektor padat modal sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketergantungan pada teknologi dan modal membuat pertumbuhan lapangan kerja berjalan lambat meskipun kegiatan industri terus berkembang. Kondisi ini sesuai dengan

temuan yang menunjukkan bahwa investasi di kawasan industri Banten tidak berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja karena kebutuhan tenaga kerjanya memang terbatas (Irfan, 2024). Keterbatasan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah juga dipengaruhi oleh hubungan kerja sama yang belum dilaksanakan secara konsisten sehingga koordinasi antar wilayah berjalan kurang efektif (Muriawan & Lituhayu, 2017).

Kondisi tenaga kerja di kedua kota tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di luar bidang studinya, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan industri (Yonanda & Usman, 2023). Lulusan SMK menghadapi situasi yang lebih sulit karena tingkat ketidaksesuaian kompetensinya lebih tinggi. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk dapat bekerja di sektor industri (Setiyana & Oktora, 2024). Ketidaksesuaian ini menyebabkan hubungan ketenagakerjaan antara Cilegon dan Kota Serang menjadi tidak seimbang, karena pasokan tenaga kerja tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan industri di Cilegon. Hambatan ini semakin jelas terlihat ketika kerja sama antardaerah tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk mengatur kebutuhan tenaga kerja secara terpadu (Muriawan & Lituhayu, 2017).

Ketidakseimbangan tersebut berimbas pada peningkatan angka pengangguran di Cilegon. Pertumbuhan angkatan kerja tidak berjalan seiring dengan kemampuan industri dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan daya serap tenaga kerja di sektor industri padat modal yang tidak memerlukan banyak penambahan pekerja (Irfan, 2024). Di samping itu, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja turut menjadi faktor yang menyulitkan lulusan memasuki sektor formal karena kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Yonanda & Usman, 2023). Tekanan ini semakin kuat dengan temuan bahwa lulusan SMK juga menghadapi kendala serupa sehingga angka penyerapan tenaga kerja tetap rendah meskipun jumlah angkatan kerja terus bertambah (Setiyana & Oktora, 2024). Posisi Cilegon dan Kota Serang dalam struktur pengangguran di Provinsi Banten dapat dilihat melalui data tingkat pengangguran terbuka berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Banten

Kabupaten/Kota	Agustus 2024	Agustus 2025
Kabupaten Pandeglang	8,09	8,80
Kabupaten Serang	9,18	8,73
Kota Cilegon	6,08	7,41
Kabupaten Lebak	6,23	7,30
Kota Serang	7,12	6,95
Kabupaten Tangerang	6,06	5,94
Kota Tangerang	5,92	5,88
Kota Tangerang Selatan	5,09	4,13

Sumber: (Radar Banten, 2025)

Tingkat pengangguran terbuka di Cilegon pada Agustus 2025 mencapai 7,41 persen.

Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini berdampak pada hubungan tenaga kerja dengan Kota Serang karena sebagian pencari kerja dari Serang turut mencari peluang di sektor industri Cilegon. Saat penyerapan tenaga kerja di Cilegon melemah, pekerja dari Serang menghadapi persaingan lebih ketat dan peluang masuk ke pasar kerja formal menjadi semakin kecil. Menurut keterangan yang dirilis, kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pencari kerja, sementara proses rekrutmen di sektor industri tidak berkembang signifikan (Radar Banten, 2025). Situasi ini memperburuk posisi tenaga kerja di kedua kota karena pasar kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat.

Peningkatan angka pengangguran menunjukkan bahwa dinamika pasar kerja regional memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di kedua kota. Industri di Cilegon telah melakukan penyesuaian kapasitas sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak bertambah, sementara Kota Serang tetap menyumbangkan tenaga kerja yang mencari peluang di sektor industri tersebut. Ketika kebutuhan industri tidak berubah, tenaga kerja dari Kota Serang menghadapi kendala yang serupa dengan tenaga kerja di Cilegon karena kompetensi yang diperlukan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang tersedia. Informasi yang tersampaikan menunjukkan bahwa sebagian perusahaan telah mengurangi proses rekrutmen. Kondisi ini menyebabkan jumlah pelamar dari kedua kota jauh melampaui peluang kerja yang tersedia (Radar Banten, 2025). Situasi ini menggambarkan bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Cilegon dan Kota Serang berada dalam tekanan yang sama akibat terbatasnya akses masuk ke sektor formal. Keterbatasan tersebut mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi bersama dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan ini.

Hambatan Kebijakan yang Membentuk Tingkat Pengangguran di Cilegon dan Kota Serang

Kebijakan ketenagakerjaan di Cilegon dan Kota Serang mengalami kesulitan dalam koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi yang efektif menyebabkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja tidak sinkron antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor industri. Situasi ini dipengaruhi oleh kerja sama antar daerah yang belum konsisten, sehingga potensi sumber daya antardaerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Muriawan & Lituhayu, 2017). Kendala ini berdampak pada penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, karena kebutuhan sektor industri tidak tertampung secara akurat dalam program pemerintah daerah. Masalah ini semakin tampak dari ketidakselarasan antara arahan kebijakan investasi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, yang saat ini banyak mengadopsi teknologi produksi (Irfan, 2024).

Kualitas pelayanan publik turut mempengaruhi dinamika pengangguran di Cilegon dan Kota Serang. Pelayanan publik yang kurang responsif mengakibatkan informasi ketenagakerjaan tidak tersebar merata kepada seluruh pencari kerja. Kondisi ini menyulitkan pencari kerja untuk beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Ketidakefisienan birokrasi memperlambat proses penyaluran tenaga kerja sehingga banyak pelamar dari kedua kota kehilangan kesempatan kerja di sektor formal. Penjelasan mengenai rendahnya efektivitas pelayanan publik di Banten menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan belum optimal mendukung penyerapan tenaga kerja

(Muhammad Ali Irfan, 2024). Hambatan birokrasi semakin nyata ketika mekanisme kerja sama antar daerah tidak didukung oleh penguatan struktur administratif yang menjamin keselarasan program antar kota (Muriawan & Lituhayu, 2017).

Ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dan kebutuhan industri turut memperparah tingkat pengangguran. Program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja belum sepenuhnya diselaraskan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, sehingga banyak lulusan yang kurang memiliki keterampilan yang relevan. Penjelasan mengenai mismatch lulusan ini menggambarkan bahwa ketidakcocokan kompetensi menyebabkan banyak tenaga kerja kesulitan memasuki pasar kerja formal, meskipun jumlah pelamar terus bertambah (Yonanda & Usman, 2023). Kondisi ini semakin kuat dengan temuan mengenai lulusan SMK yang juga menghadapi hambatan serupa. Hal ini disebabkan kebutuhan industri memerlukan keterampilan yang lebih spesifik daripada yang dikuasai lulusan (Setiyana & Oktora, 2024). Hambatan dalam penyesuaian kebijakan ini membuat proses penyiapan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri tidak berjalan efektif. Akibatnya, peluang kerja bagi tenaga kerja di Cilegon dan Kota Serang tetap terbatas.

Keterbatasan dalam perencanaan dan pendanaan program ketenagakerjaan juga menjadi kendala dalam menurunkan angka pengangguran di Cilegon dan Kota Serang. Rencana program sering kali tidak didukung oleh kemampuan anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja hanya berjalan dalam lingkup yang terbatas. Ketimpangan dalam alokasi investasi menyebabkan kawasan industri tidak mendapat dukungan anggaran yang cukup untuk mengembangkan skema pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (Irfan, 2024). Hambatan anggaran ini semakin diperparah oleh belum adanya rencana kerja sama antarwilayah yang dapat menggabungkan sumber daya kedua kota ke dalam satu strategi bersama (Muriawan & Lituhayu, 2017). Kondisi ini yang mengakibatkan program ketenagakerjaan kehilangan arah yang jelas, karena setiap daerah bergerak secara terpisah tanpa didukung oleh kerangka perencanaan kolaboratif yang berkelanjutan.

Peran Kolaborasi Cilegon dan Kota Serang dalam Penguatan Pasar Kerja Regional

Kolaborasi antara Cilegon dan Kota Serang memiliki peran sangat penting dalam menyusun pasar kerja regional, karena kedua wilayah saling terhubung secara alami. Aliran tenaga kerja, pemenuhan kompetensi, dan pola industri saling terkait, sehingga kebijakan di satu kota berdampak langsung pada wilayah lainnya. Ketika industri di Cilegon membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, Kota Serang menjadi penyuplai utama yang perlu menyesuaikan sistem pendidikannya dengan permintaan industri tersebut. Ketidakcocokan kompetensi yang selama ini menjadi hambatan dapat diatasi melalui kerja sama berbasis kebutuhan industri. Penelitian Yonanda & Usman (2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualifikasi lulusan terjadi dalam tingkat yang cukup tinggi dan memengaruhi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan untuk memperkuat hubungan antarwilayah juga didukung oleh temuan Muriawan & Pratiwi (2016), yang menjelaskan bahwa kerja sama yang tidak terkoordinasi menyebabkan potensi wilayah tidak dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi yang terstruktur memungkinkan penyelarasan kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penempatan kerja yang lebih efektif di tingkat regional.

Peran kolaborasi juga terlihat dalam penyusunan kebijakan pelatihan tenaga kerja. Cilegon memiliki kebutuhan tenaga kerja industri yang spesifik, sementara Kota Serang

memiliki jumlah lulusan yang besar dan membutuhkan pemetaan yang jelas agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan yang dirancang bersama, baik melalui lembaga pendidikan maupun balai pelatihan kerja. Kebutuhan pelatihan ini semakin mendesak karena mismatch pada lulusan SMK berada pada tingkat yang tinggi dan kondisi tersebut membuat peluang masuk ke sektor industri semakin terbatas (Setiyana & Oktora, 2024). Penguatan kebijakan bersama juga dapat mengurangi hambatan yang muncul akibat perbedaan arah kebijakan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan akan terbentuk ketika hubungan antardaerah berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan (Muriawan & Lituhayu, 2017). Kerja sama ini memungkinkan penciptaan sistem pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan industri sekaligus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Kolaborasi antara kedua kota juga berperan dalam mengatasi hambatan yang berasal dari struktur industri. Industri di Cilegon yang bersifat padat modal tidak secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga peran Kota Serang sebagai penyedia tenaga kerja memerlukan kebijakan yang terintegrasi. Kebutuhan ini muncul karena investasi berskala besar tidak memberikan dampak langsung pada perluasan lapangan kerja ketika kebutuhan tenaga kerja justru berada pada tingkat yang rendah (Irfan, 2024). Kebijakan bersama yang menghubungkan perkembangan industri di Cilegon dengan kapasitas tenaga kerja di Kota Serang dapat menciptakan pola perencanaan yang baru dan lebih adaptif terhadap dinamika pasar kerja. Keselarasan semacam ini diperlukan, karena sering kali terjadi ketidaksesuaian kompetensi pada lulusan, yang mengakibatkan proses penyerapan tenaga kerja berjalan lambat dan kesempatan kerja menjadi semakin terbatas (Yonanda & Usman, 2023).

Kolaborasi antara Cilegon dan Kota Serang memberikan ruang untuk memperkuat tata kelola ketenagakerjaan. Data tenaga kerja dari kedua wilayah dapat dikelola secara terintegrasi sehingga pemerintah daerah dapat memahami kebutuhan industri, ketersediaan lulusan, dan pola penyalurannya dengan lebih jelas. Integrasi data ini dapat mendorong perencanaan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran. Penjelasan mengenai hambatan pelaksanaan kerja sama menunjukkan bahwa masalah sering muncul ketika daerah bekerja sendiri tanpa struktur koordinasi yang kuat (Muriawan & Lituhayu, 2017). Kolaborasi yang terencana dapat mengurangi hambatan tersebut dan menghasilkan mekanisme yang lebih responsif terhadap perubahan pasar kerja. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa penyesuaian arah investasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja hanya dapat dilakukan melalui rencana yang terintegrasi antar wilayah (Irfan, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Kota Cilegon dan Kota Serang masih belum optimal dalam menurunkan angka pengangguran karena dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja, struktur industri yang padat modal, serta lemahnya koordinasi kebijakan antarwilayah. Tantangan tata kelola, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan ketidakefektifan birokrasi semakin memperburuk efektivitas program ketenagakerjaan di kedua kota. Selain itu, kebijakan investasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja menyebabkan penyerapan

tenaga kerja tetap rendah meskipun realisasi investasi tinggi. Kolaborasi yang terstruktur antara Cilegon dan Serang diperlukan untuk menyelaraskan pemetaan kebutuhan industri, pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, serta integrasi data ketenagakerjaan antarwilayah. Kerja sama yang lebih konsisten dan berbasis kebutuhan dapat menjadi strategi kunci dalam memperkuat pasar kerja regional dan mengurangi tingkat pengangguran secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, R. N., Wibowo, A. S., Astuti, A., & Suherman. (2020). Kemiskinan Dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 315–328. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9876>
- Cahyani, L., & Karniawati, N. (2024). Government Strategy for Overcoming Poverty in Cilegon City, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 166–175. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.22294>
- Ferdiansyah, Y., Kustana, Dita Sasmita, S., & Mauluddin, A. (2024). The Analysis of Urbanization's Impact on Increasing Unemployment in Bandung. *JCIC: Journal of Urban Sociology*, 1(1), 1–30.
- Irfan, M. A. (2024). Strategi Sinergi Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cilegon Cilegon. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 12(2), 174–186. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.241>
- Muriawan, F. R., & Lituhayu, D. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Wilayah Kedungsepur Bidang Pariwisata. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6(0), 7.
- Nurfaisal, M. D. (2024). Governance Challenges for Banten Province's Leadership in 2025. *JCLP : Journal of Contemporary Local Politics*, 3(2), 111–122.
- Purnama, R., Riswanda, & Cadith, J. (2024). The Evaluation of Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009 Concerning Employment Services at the Cilegon City Government Labor Service i. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(1), 65–72.
- Setiyana, A., & Oktora, S. I. (2024). Analisis Horizontal Mismatch pada Tenaga Kerja Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 19(2), 109–124. <https://doi.org/10.55980/jki.2024.5513>
- Setyadi, S., & Oktaviana, O. (2021). The Analyze of Investment For Alleviating Unemployment Problems in Banten Province. *JEJ: Jambura Equilibrium Journal*, 3(1), 19–30. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij>
- Yonanda, A. P., & Usman, H. (2023). Determinan Status Horizontal Mismatch pada Pekerja Lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2), 142–157. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.239>